



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 18 Juli 2025

Ketua H. Abdullah Nashih Wakil Ketua Suygrno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, S.H. Wakil Ketua Warli Andono, S.P.

## RINGKASAN BERITA HARI INI

### PKB Akan Kritis meski Tak Gabung Koalisi

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo memastikannya tetap bersikap independen, tidak tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju. Meski begitu, PKB menegaskan tetap siap bekerja sama secara konstruktif dan kritis demi kemajuan daerah.

Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nashih mengungkapkan, pihaknya sempat diajak bergabung dalam koalisi. Nashih menegaskan, tidak tergabung dalam koalisi tidak berarti PKB akan bersikap berseberangan. "Prinsipnya kami bersikap sesuai independensi kami. Kami siap bekerja sama dengan teman-teman di koalisi. Tergabung atau tidak, bukan soal," ucapnya.

Nashih menambahkan, meski dalam pandangan akhir (PA) PKB di paripurna menyetujui raperda pertanggungjawaban APBD 2024, pihaknya tetap melihat ada beberapa koreksi. "Untuk 2025 ke atas, kami kritis tentunya," imbuh pria yang juga Ketua DPRD Sidoarjo itu. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menegaskan, sikap kritis akan tetap dipegang, terutama saat pembahasan Rencana Pemba-



BERSIKAP: Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nashih (tengah) memberikan penjelasan soal absennya PKB dalam Koalisi Sidoarjo Maju di Kantor DPC PKB kemarin (17/7). Namun, Mereka tetap akan kerja sama membangun daerah.

Prinsipnya kami bersikap sesuai independensi kami. Kami siap bekerja sama dengan teman-teman di koalisi. Tergabung atau tidak, bukan soal."

ABDILLAH NASIH Ketua DPC PKB Sidoarjo

ngunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) 2025 ke atas. "Program unggulan yang 14 itu akan kami kritis, agar tidak sekedar formalitas," katanya. Salah satu program yang disorot adalah janji bantuan desa sebesar Rp 500 juta per tahun. PKB menilai program itu perlu kejelasan skema anggaran. "Apa iya anggaran kita mencukupi? Makanya perlu skema yang realistis," ujarnya. (eza/uzi)

### Kritis Tata Kelola Pemerintahan, 7 Partai Bentuk Koalisi Sidoarjo Maju

Soroti Banjir, Jalan Rusak, dan Pengangguran

SIDOARJO - Usul penolakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, tujuh partai membentuk Koalisi Sidoarjo Maju. Yaitu, Partai Golkar, PAN, PKS, Nasdem, PPP, PDIP dan Gerindra. Menyisakan PKB dan Demokrat. Mereka ingin tata kelola pemerintahan berorientasi pada hasil.

Koalisi terbentuk Rabu (16/7) di Kantor Golkar Sidoarjo, ditelakikan Ketua DPC Golkar Sidoarjo Achza Rusdi. Sejumlah petinggi partai koalisi juga hadir. Koalisi itu dibentuk atas dasar persamaan visi dan sikap kritis terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Menurut Achza Rusdi, sebut menilai pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan efektivitas tata

Ini marahnya anggota dewan sebagai legislatif. Apapun keputusannya, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo."

MIMIK IDAYANA Ketua DPC Gerindra Sidoarjo

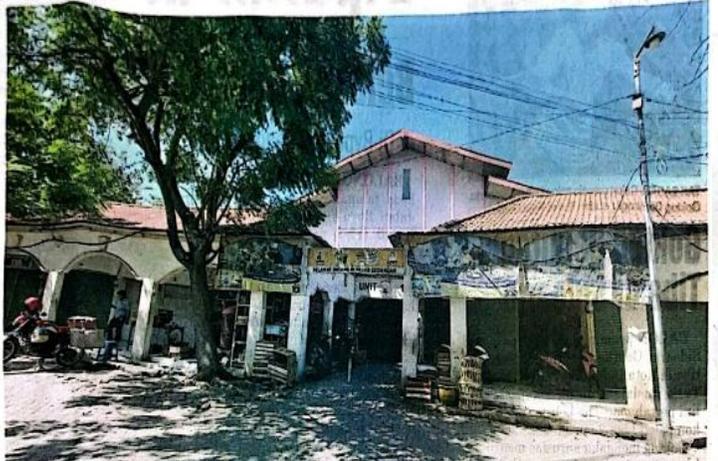
kelola pemerintahan. Adam menyoroti sejumlah persoalan seperti banjir, jalan rusak, dan pengangguran, yang menurutnya belum ditangani serius oleh Pemkab. "Kami merasa, pelaksanaan APBD 2024 belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra sekaligus Wakil Bupati Sidoarjo Mimiik Idayana menyetujui sikap politik yang diambil fraksi adalah bagian dari kewenangan dan marwah lembaga legislatif yang harus dihormati. "Terkait masalah penolakan, saya kembali ke anggota dewan masing-masing," katanya kemarin (17/7).

Mimiik menegaskan, sebagai ketua DPC, dirinya tidak bisa mencampuri sikap politik yang diambil oleh fraksi. Menurutnya, keputusan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Menurutnya, apapun sikap fraksi, baik itu menerima atau menolak raperda, harus bermuara pada kepentingan masyarakat. "Saya sebagai Ketua DPC tidak bisa mengambil keputusan. Ini marahnya anggota dewan sebagai legislatif. Apapun keputusannya, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," ujarnya. (eza/uzi)



KOMPAS: Perwakilan dari tujuh partai mendklarasikan Koalisi Sidoarjo Maju di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7). Mereka komitmen kritis terhadap Pemkab Sidoarjo.



DIPERBAIKI: Pasar Tradisional Gedangan menjadi salah satu pasar yang akan direhabilitasi tahun ini.

### Lima Pasar Tradisional Direhabilitasi Tahun Ini

KOTA-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo akan merehabilitasi lima pasar tradisional tahun ini. Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Lima pasar yang akan direhabilitasi meliputi: Pasar Gedangan, Pasar Taman, Pasar Wadugarsi, Pasar Prambon, dan Pasar Bulang. Seluruh ke-

giatan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kepala Bidang Pasar Disperindag Sidoarjo, Sul-ton Hasan, menjelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan dalam bentuk perbaikan dan pemeliharaan, bukan renovasi total. "Tidak ada yang direhab-

ilitasi, hanya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pasar," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Kamis (17/7). Fasilitas yang akan diperbaiki mencakup atap, saluran drainase, kios, dan sarana umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan baik bagi pengunjung maupun pedagang. Pelaksanaan pekerjaan

- LIMA PASAR YANG DIPERBAIKI: Pasar Gedangan, Pasar Taman, Pasar Wadugarsi, Pasar Prambon, Pasar Bulang

ditargetkan dimulai pada Agustus hingga September 2025. Pekerjaan kami jadwalkan pada triwulanan ketiga," tambahnya. Ke Halaman 10

### Tetap Kritis Pemerintahan Subandi-Mimik

PKB Pilih Tidak Gabung Koalisi Sidoarjo Maju PDIP Tolak LPJ Atas Perintah Pusat

SIDOARJO, SEKITA - Sebuah politik di Sidoarjo sedang meredam. Setelah partai pemilik kursi di DPRD Sidoarjo memantapkan Koalisi Sidoarjo Maju (KSM) dengan PKB sebagai sekutu utama, koalisi bergeser ke dalam kubu terbelah. Manalagi KSM adalah anak dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Kita sebagai partai yang sama-sama berjuang untuk kemajuan daerah, kita tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat," kata Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nashih.

Keputusan koalisi terbelah ini dipicu oleh sikap kritis dari beberapa partai. "Kami tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintahan Subandi-Mimik. Kami tidak akan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat," ujar Ketua DPC Gerindra Mimiik Idayana.

Keputusan koalisi terbelah ini dipicu oleh sikap kritis dari beberapa partai. "Kami tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintahan Subandi-Mimik. Kami tidak akan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat," ujar Ketua DPC Gerindra Mimiik Idayana.

TOLAK LPJ - Koalisi Sidoarjo Maju saat menggelar konferensi pers terkait penolakan terhadap LPJ Bupati 2024, Rabu (16/7). Mereka menyoroti sejumlah hal dalam pemerintahan. Foto: Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdullah Nashih dan para pengurus saat memberikan keterangan kepada media di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Kamis (17/7). PKB memilih sikap sendiri di tengah kondisi politik di Sidoarjo yang sedang memanas.

#### STORY HIGHLIGHTS:

- Partai yang tergabung dalam KSM adalah Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKS, PPP dan PDIP.
- PKB menyatakan tidak bergabung sebagai sekutu utama koalisi.
- Paling sedikitnya ada dua partai yang berpisah pada rapat.

ini, kita bisa sama-sama tetap independen, atau bisa juga bergabung yang beres-beres dengan sikap politik yang benar. Kita akan tetap kritis terhadap pemerintahan Subandi-Mimik. Kami tidak akan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat," ujar Ketua DPC Gerindra Mimiik Idayana.

### Empat Ruas Jalan Siap Dibeton, Proyek Dimulai Dua Bulan Lagi

KOTA-Empat ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo akan segera dilakukan betonisasi. Proyek peninggian jalan tersebut di-

jadwalkan mulai dilaksanakan sekitar dua bulan ke depan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DUPUM-BM) Sidoarjo, Dwi Eko Saptomo, mengatakan bahwa proyek ini saat ini telah memasuki tahap penunjukan pemenang lelang.

## Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

## PKB Akan Kritis meski Tak Gabung Koalisi

**PARTAI** Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo memastikan tetap bersikap independen, tidak tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju. Meski begitu, PKB menegaskan tetap siap bekerja sama secara konstruktif dan kritis demi kemajuan daerah.

Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih mengungkapkan, pihaknya sempat diajak bergabung dalam koalisi. Nasih menegaskan, tidak tergabung dalam koalisi tidak berarti PKB akan bersikap berseberangan. "Prinsipnya kami bersikap sesuai independensi kami. Kami siap bekerja sama dengan teman-teman di koalisi. Tergabung atau tidak, bukan soal," ucapnya.

Nasih menambahkan, meski dalam pandangan akhir (PA) PKB di paripurna menyetujui raperda pertanggungjawaban APBD 2024, pihaknya tetap melihat ada beberapa koreksi. "Untuk 2025 ke atas, kami kritis tentunya," imbuh pria yang juga Ketua DPRD Sidoarjo itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menegaskan, sikap kritis akan tetap dipegang, terutama saat pembahasan Rencana Pemba-



AHMAD REZA/JAWA POS

**BERSIKAP:** Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih (tengah) memberikan penjelasan soal absennya PKB dalam Koalisi Sidoarjo Maju di Kantor DPC PKB kemarin (17/7). Namun, Mereka tetap akan kerja sama membangun daerah.

Prinsipnya kami bersikap sesuai independensi kami. Kami siap bekerja sama dengan teman-teman di koalisi. Tergabung atau tidak, bukan soal."

**ABDILLAH NASIH**  
Ketua DPC PKB Sidoarjo

ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 ke atas. "Program unggulan yang 14 itu akan kami kritisi, agar tidak sekadar formalitas," katanya.

Salah satu program yang disorot adalah janji bantuan desa sebesar Rp 500 juta per tahun. PKB menilai program itu perlu kejelasan skema anggaran. "Apa iya anggaran kita mencukupi? Makanya perlu skema yang realistis," ujarnya. (eza/uzi)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**MINIM PEMINAT:** Siswa SDN Banjarasri Tanggulangin berolahraga di halaman sekolah kemarin (17/7). Halaman dan ruang kelas di sana kerap banjir saat musim hujan.

## SDN Banjarasri Hanya Dapat 8 Murid

### Imbas Sekolah Sering Banjir

**SIDOARJO** - SDN Banjarasri di Kecamatan Tanggulangin hanya mendapatkan 8 murid pada tahun ajaran baru ini. Penyebabnya, karena sekolah itu kerap banjir.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo segera mengevaluasi perolehan siswa di sana. Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirta Adi mengatakan, salah satu faktor minimnya siswa baru

kemungkinan karena banyak lulusan TK maupun RA di sekitar Banjarasri yang lebih memilih sekolah swasta. "Bisa jadi masuk ke SD swasta atau MI swasta. Ini bagian dari tantangan sekolah negeri untuk meningkatkan mutu," ujarnya kemarin (17/7).

Tirta mengungkapkan, lokasi SDN Banjarasri juga menjadi perhatian. Sekolah tersebut kerap terdampak banjir saat musim hujan. "Karena itu sekolah akan ditinggikan. Sudah masuk rencana peninggian tahun ini," ungkapnya.

Baik gedung maupun halaman sekolah akan ditinggikan. Harapannya, tidak banjir lagi.

Selain di sana, Dinas Dikbud juga telah menyiapkan anggaran besar untuk rehabilitasi sekolah lainnya, termasuk pembangunan ruang kelas baru (RKB). "Total anggaran Rp 109,6 miliar. Untuk SD ada 108 titik dan SMP Negeri 35 titik. Jadi total 144 titik," ujarnya. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan, jumlah siswa di sekolah negeri bisa kembali meningkat. (eza/uzi)

## Jawa Pos

## Tetap Kritisi Pemerintahan Subandi-Mimik

► PKB Pilih Tidak Gabung Koalisi Sidoarjo Maju ► PDIP Tolak LPJ Atas Perintah Pusat



**TOLAK LPJ** - Koalisi Sidoarjo Maju saat menggelar konferensi pers terkait penolakan terhadap LPJ Bupati 2024, Rabu (16/7). Mereka mengkritisi sejumlah hal dalam keterangannya. Foto kanan: Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih dan para pengurus saat menyampaikan keterangan kepada media di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Kamis (17/7). PKB memilih sikap sendiri di tengah kondisi politik di Sidoarjo yang sedang memanas.

**SIDOARJO, SUKTA** - Suhu politik di Sidoarjo sedang mendidih. Setelah tujuh partai pemilik kursi di DPRD Sidoarjo membentuk Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), giliran PKB menentukan putusannya untuk berjalan sendiri tanpa bergabung ke dalam koalisi tersebut. Munculnya KSM adalah imbas dari penolakan DPRD Sidoarjo terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati 2024.

Meski demikian, Ketua DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih bakal tetap kritis ke pemerintahan yang dipimpin Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. "Kemarin kita menerima LPJ 2024 karena pemerintahan yang berjalan tahun itu merupakan kepala daerah yang diusung PKB. Namun kita tetap memberikan sejumlah catatan yang tidak jauh beda dengan teman-teman fraksi lain," kata Nasih saat di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Kamis (17/7).

Namun pihaknya mengaku

tetap memahami sikap fraksi-fraksi lain yang menolak LPJ tersebut. Disebutnya itu sebagai dinamika politik. Sehingga perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah. Termasuk ketika Golkar, Gerindra, PAN, PKS, NasDem, PPP dan PDIP membentuk koalisi, PKB juga mengaku menghormatinya. "Menuju titik yang sama itu bisa jadi jalannya berbeda dan itu tidak apa-apa," ujarnya.

Persoalan LPJ APBD 2024 dirasa sudah selesai. Sekarang, PKB menyatakan telah mengambil sikap sebagai mitra kritis pemerintah. Bersama KSM atau tidak bersama, dirasa juga tidak ada masalah. "Sekarang kondisinya sudah beda. Kami bukan partai pengusung. Sehingga kami nyatakan bahwa sikap kami adalah mitra kritis. Selama kebijakan berpihak kepada rakyat pasti kita dukung, tapi sebaliknya ketika kebijakan atau programnya tidak sesuai, kita akan kritis," tegas Nasih.

Dicontohkan dalam pembahasan RPJMD 2025-2029, PKB banyak mengkritisi program-program pemerintahan Subandi-Mimik Idayana. Seperti program 100 ribu tenaga kerja, beasiswa pendidikan, dan sejumlah program lainnya. "Kita tegaskan bahwa program harus benar sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan cuma program elektoral," lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudori dalam kesempatan yang sama.

Kemudian kegagalan Pemkab Sidoarjo dalam Porprov Jatim 2025, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan merekomendasikan agar KONI Sidoarjo dievaluasi secara menyeluruh. "Program 100.000 tenaga kerja, kita benar-benar kritis itu agar teralisasi dengan baik, program Ro 500 juta per desa per tahun juga demikian, kita kritis agar tidak sekadar menjadi program elektoral," tandasnya.

Kemudian program rehabilitasi warung pihaknya minta ditingkatkan anggarannya, tapi harus lebih selektif. Program beasiswa yang dirasa ambigu juga disorot karena bentuknya lebih ke bantuan pendidikan, bukan beasiswa. "Sebanyak 14 program pemerintahan Subandi-Mimik itu kita dorong agar benar-benar landing dengan baik. Namun untuk kritis itu kan tidak harus bergabung dalam koalisi secara formalitas begit-

### STORY HIGHLIGHTS

- Papil yang tergabung dalam KSM adalah Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PPP dan PDIP.
- PKB menyatakan telah mengambil sikap sebagai mitra kritis pemerintah.
- Dukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kritis program yang tidak sesuai.

tu, kita bisa sama-sama tapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi," tandasnya.

Sebelumnya sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk koalisi untuk menyikapi LPJ Penggunaan APBD 2024. Namanya Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), yang muncul beberapa saat setelah DPRD Sidoarjo menolak LPJ bupati, Rabu (16/7).

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PPP dan PDIP yang gabung menjelang digelar konferensi pers di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu petang. "Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ 2024," kata Ketua DPC Golkar Sidoarjo Adam Rusdy.

Ada beberapa hal menjadi catatan dalam penggunaan APBD 2024. Antara lain ten-

tu, kita bisa sama-sama tapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi," tandasnya.

Sebelumnya sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk koalisi untuk menyikapi LPJ Penggunaan APBD 2024. Namanya Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), yang muncul beberapa saat setelah DPRD Sidoarjo menolak LPJ bupati, Rabu (16/7).

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PPP dan PDIP yang gabung menjelang digelar konferensi pers di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu petang. "Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ 2024," kata Ketua DPC Golkar Sidoarjo Adam Rusdy.

Ada beberapa hal menjadi catatan dalam penggunaan APBD 2024. Antara lain ten-

tu, kita bisa sama-sama tapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi," tandasnya.

Kemudian mereka juga memandang bahwa infrastruktur jalan di Sidoarjo masih jauh dari harapan publik. Masih ditemukan ra-

tu, kita bisa sama-sama tapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi," tandasnya.

Sebelumnya sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk koalisi untuk menyikapi LPJ Penggunaan APBD 2024. Namanya Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), yang muncul beberapa saat setelah DPRD Sidoarjo menolak LPJ bupati, Rabu (16/7).

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PPP dan PDIP yang gabung menjelang digelar konferensi pers di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu petang. "Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ 2024," kata Ketua DPC Golkar Sidoarjo Adam Rusdy.

Ada beberapa hal menjadi catatan dalam penggunaan APBD 2024. Antara lain ten-

tu, kita bisa sama-sama tapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi," tandasnya.

Kemudian mereka juga memandang bahwa infrastruktur jalan di Sidoarjo masih jauh dari harapan publik. Masih ditemukan ra-

## Kritisi Tata Kelola Pemerintahan, 7 Partai Bentuk Koalisi Sidoarjo Maju

### Soroti Banjir, Jalan Rusak, dan Pengangguran

SIDOARJO - Usai penolakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, tujuh partai membentuk Koalisi Sidoarjo Maju. Yakni, Partai Golkar, PAN, PKS, Nasdem, PPP, PDIP, dan Gerindra. Menyisakan PKB dan Demokrat. Mereka ingin tata kelola pemerintahan berorientasi pada hasil.

Koalisi terbentuk Rabu (16/7) di Kantor Golkar Sidoarjo, dideklarasikan Ketua DPC Golkar Sidoarjo Adam Rusdi. Sejumlah petinggi partai koalisi juga hadir. Koalisi itu dibentuk atas dasar persamaan visi dan sikap kritis terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

Menurut Adam, koalisi tersebut menilai pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan efektivitas tata

Ini marwahnya anggota dewan sebagai legislatif. Apapun keputusannya, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo."

#### MIMIK IDAYANA

Ketua DPC Gerindra Sidoarjo

kelola pemerintahan. Adam menyoroti sejumlah persoalan seperti banjir, jalan rusak, dan pengangguran, yang menurutnya belum ditangani serius oleh Pemkab. "Kami merasa, pelaksanaan APBD 2024 belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.



Sementara itu, Ketua DPC Gerindra sekaligus Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyebut sikap politik yang diambil fraksi adalah bagian dari kewenangan dan marwah lembaga legislatif yang harus dihormati. "Terkait masalah penolakan, saya kembalikan ke anggota dewan masing-masing," katanya kemarin (17/7).

Mimik menegaskan, sebagai ketua DPC, dirinya tidak bisa mencampuri sikap politik yang diambil oleh fraksi. Menurutnya, keputusan tersebut adalah bagian dari tanggung jawab anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Menurutnya, apapun sikap fraksi, baik itu menerima atau menolak raperda, harus bermuara pada kepentingan masyarakat. "Saya sebagai Ketua DPC tidak bisa mengambil kebijakan. Ini marwahnya anggota dewan sebagai legislatif. Apapun keputusannya, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," ujarnya. (eza/uzi)



KOMPAK: Perwakilan dari tujuh partai mendeklarasikan Koalisi Sidoarjo Maju di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7). Mereka komitmen kritis terhadap Pemkab Sidoarjo.

AHMAD REZA/JAWA POS



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## Ajak Siswa Cegah Perundungan

🗨️ Fokus kami, mencegah adanya perundungan maupun bentuk kekerasan lainnya. Termasuk juga risiko keterlibatan dalam kasus hukum seperti *bullying*, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan media sosial. Edukasi semacam itu diharapkan bisa membentengi siswa dari hal-hal negatif.”



**PRASTIWI TRIJANTI**  
Kepala UPTD  
PPA Kabupaten  
Sidoarjo bicara soal  
keterlibatannya dalam  
masa pengenalan  
lingkungan sekolah  
(MPLS)

# Jawa Pos



Sebanyak 155 ribu lebih warga Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan subsidi ipah (BSU)

## Sebanyak 155 Ribu Lebih Warga Terima Bantuan BSU

**SIDOARJO** - Sebanyak 155 ribu lebih warga Kabupaten Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengatakan bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu.

"Penyaluran BSU dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)," ujar Fenny saat acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo, Rabu sore (16/7/25).

Ia menjelaskan, total anggaran yang disiapkan pemerintah

mencapai Rp111 miliar. Dari jumlah itu, Rp46,7 miliar disalurkan melalui Kantor Pos kepada 77.988 penerima. Sisanya akan disalurkan melalui bank Himbara.

"Hari ini secara simbolis kami menyerahkan bantuan kepada kader kesehatan Posyandu yang belum memiliki rekening bank Himbara," jelasnya.

Fenny berharap BSU ini dapat dimanfaatkan secara bijak, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

"Saya harap bantuan ini bisa digunakan untuk hal produktif, misalnya mendukung ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan seperti Asman Toga (Asuhan

Mandiri Tanaman Obat Keluarga), membuat keripik atau makanan bernilai jual. Dengan begitu, uang Rp600 ribu tetap berputar dan bermanfaat jangka panjang," pesannya.

Terpisah, salah satu penerima BSU, Heny Apriningsih (61), kader Posyandu dari Kelurahan Sidoklumpuk Kamis (17/7/25), menyambut gembira bantuan tersebut. Ia mengaku terbantu dan telah memanfaatkan BSU untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

"Saya berencana menginvestasikan bantuan ini untuk menanam Toga dan memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidup," ungkap Heny. • Loe



# INFO MEDIA PERS

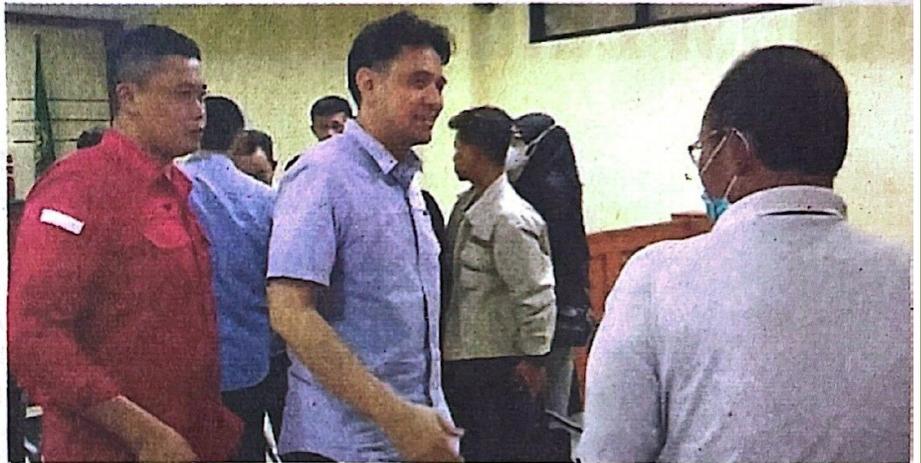
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Tarif Sewa Rusunawa Tak Sesuai Aturan

SEDATI-Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo, semakin menguat dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Salah satu fakta mengejutkan yang terungkap dalam persidangan adalah

- Ke Halaman 10



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

**AGENDA SAKSI: Terdakwa Imam Fauzi (tengah) usai menjalani sidang di Tipikor Surabaya.**





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Tarif Sewa Rusunawa...

penetapan tarif sewa kamar rusunawa yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 9,7 miliar.

Dalam sidang tersebut, lima mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah Agoes Boediono Tjahjono, Dwijo Prawiro, Sulaksono, Setyo Basukiono, dan Heri Soesanto.

Kelima saksi memberikan keterangan terkait lemahnya pengawasan serta dugaan penyimpangan pengelolaan aset daerah oleh pengelola Rusunawa Tambaksawah.

"Pengawasan yang kami lakukan hanya sebatas fisik, mendatangi lokasi rusun. Kami tidak pernah menerima laporan keuangan enam bulanan dari pengelola," ujar Sulaksono dalam persidangan.

Hal serupa disampaikan oleh Heri Soesanto, yang kini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidoarjo. Ia menyebut bahwa penetapan tarif sewa seharusnya dilakukan melalui keputusan bupati, bukan secara sepihak oleh pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Tambaksawah.

"Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saya sampaikan bahwa tarif sewa harusnya ditetapkan lewat keputusan bupati. Tapi kenyataannya, tidak

ada keputusan itu. Tarif ditetapkan sendiri oleh pengelola desa," tegas Heri.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius soal legalitas tarif sewa serta transparansi pengelolaan dana dari ratusan unit kamar di Rusunawa.

Padaahal, sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS), pengeluaran operasional seharusnya tidak melebihi 40 persen dari total pendapatan per tahun.

Namun, dalam praktiknya, angka tersebut terlampaui dan dana digunakan tidak sesuai peruntukan.

Dwijo Prawiro, mantan Kadis Perkim CKTR lainnya, juga mengaku tidak pernah menerima laporan keuangan selama menjabat. "Saya tidak pernah menerima laporan, bahkan tidak tahu apakah laporan itu pernah dibuat atau tidak," ujarnya saat ditanyai jaksa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo, I Putu Kianu Gupta, menegaskan bahwa seluruh saksi yang dihadirkan menjabat dalam periode penting pengelolaan Rusunawa antara tahun 2006 hingga 2022.

"Dari semua kepala dinas yang sudah diperiksa, bahkan bupati sekalipun belum ada yang menjadi tersangka dalam perkara ini," ujarnya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

**PERBAIKAN JALAN: Jalan Industri ruas Sidokepung-Buduran menjadi salah satu ruas yang akan dibeton.**

## Empat Ruas Jalan Siap Dibeton, Proyek Dimulai Dua Bulan Lagi

KOTA-Empat ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo akan segera dilakukan betonisasi. Proyek peninggian jalan tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan sekitar dua bulan ke depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMS-DA) Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, mengatakan bahwa proyek ini saat ini telah memasuki tahap penunjukan pemenang lelang.

● Ke Halaman 10



### Empat Ruas Jalan...

"Prosesnya kini sedang dalam tahapan SPPBj (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa). Penandatanganan kontrak direncanakan pada akhir Juli," ujarnya, Kamis (17/7).

Adapun empat ruas jalan yang akan dibeton meliputi: Jalan Kepuhkirimankureksari, Jalan Pabean-Ngingas (Kecamatan Waru), Jalan Sidodadi-Bringinbendo (Kecamatan Taman), dan Jalan

Industri ruas Sidokepung-Buduran. "Proyek diperkirakan bisa dimulai pada akhir Agustus atau awal September," jelas Dwi.

Pengerjaan proyek tidak hanya mencakup betonisasi, tetapi juga peninggian jalan serta pembangunan dan perbaikan saluran drainase. Seluruh badan jalan akan ditinggikan antara 50 hingga 60 sentimeter.

Selain empat ruas tersebut, Dwi mengungkapkan bahwa ada dua ruas

tambahan yang akan masuk dalam paket pekerjaan tahun ini, masing-masing berlokasi di Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati.

"Dengan tambahan ini, total akan ada

11 ruas jalan yang dibeton dan ditinggikan hingga 2025. Awalnya hanya direncanakan sembilan ruas," terangnya.

Dwi menegaskan, betonisasi ini difokuskan pada akses menuju kawa-

san industri di Sidoarjo. "Selain mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, jalan beton juga lebih tahan terhadap beban kendaraan berat," pungkasnya. (sai/vga)



## Minim Siswa, Kepala SDN Banjarasri Diminta Evaluasi

**TANGGULANGIN-** Jumlah siswa baru di SDN Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, tahun ini hanya delapan orang. Minimnya pendaftar ini diduga kuat dipengaruhi oleh kondisi sekolah yang kerap tergenang banjir saat musim hujan.

Banyak orang tua memilih mendaftarkan anak mereka ke sekolah swasta yang dinilai lebih aman dan nyaman. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan sekolah negeri akan semakin kehilangan peminat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Tirta Adi, menanggapi persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa mutu pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah.

“Mutu pendidikan ditentukan oleh kepala sekolah. Inovasi dan kreativitas guru juga penting, tentunya didukung dengan fasili-



DOK

**TERGANGGU:** Siswa SDN Banjarasri saat upacara dengan kondisi tergenang banjir.

litas yang memadai,” ujar Tirta, Kamis (17/7).

Untuk mengatasi persoalan banjir dan fasilitas rusak, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah peninggian bangunan sekolah dan pembangunan ruang kelas baru (RKB).

“Tahun ini saja kami mengalokasikan lebih dari Rp 100 miliar untuk program rehabilitasi dan pembangu-

nan RKB,” jelasnya.

Dari total anggaran sebesar Rp 109,6 miliar tersebut, sebanyak 144 titik sekolah akan menerima alokasi. Rinciannya, 108 titik untuk jenjang SD negeri dan 35 titik untuk SMP negeri.

Tirta memastikan bahwa SDN Banjarasri akan masuk dalam daftar sekolah yang akan ditinggikan bangunannya,

● Ke Halaman 10

**RADAR**  
SIDOARJO.ID

### Minim Siswa, ...

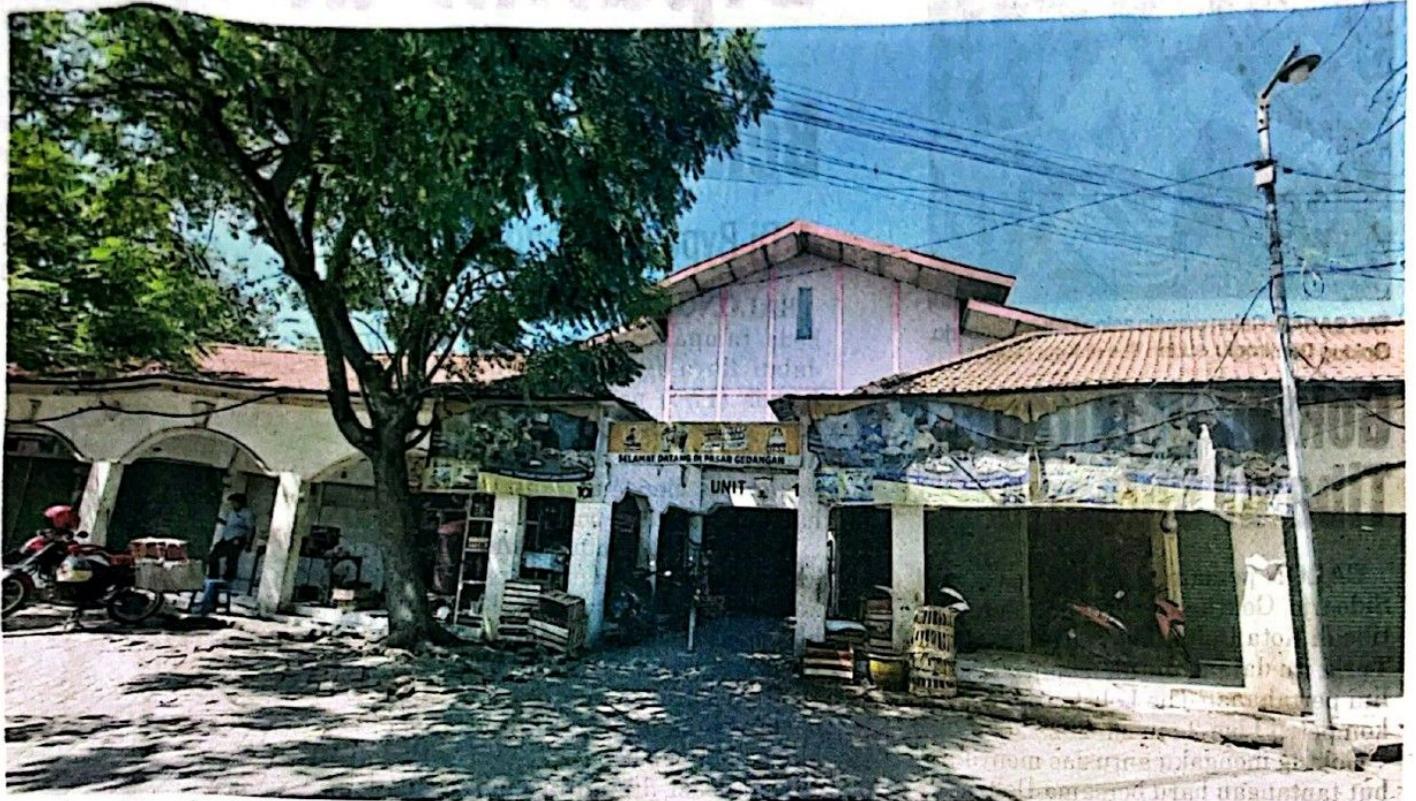
guna mengatasi banjir yang selama ini menjadi persoalan utama. Namun, ia juga menyoroti tantan-

gan lain yang dihadapi sekolah negeri di wilayah tersebut. Banyak lulusan TK dan RA lebih memilih melanjutkan ke SD atau MI swasta.

“Sekolah negeri di sana harus me-

ningkatkan mutu dan melakukan branding. Harus ada kekhasan yang ditonjolkan agar kembali diminati masyarakat,” pungkasnya. (sai/vga)

**RADAR**  
SIDOARJO.ID



DIPERBAIKI: Pasar Tradisional Gedangan menjadi salah satu pasar yang akan direhabilitasi tahun ini.

M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

## Lima Pasar Tradisional Direhabilitasi Tahun Ini

KOTA-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo akan merehabilitasi lima pasar tradisional tahun ini. Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Lima pasar yang akan direhabilitasi meliputi: Pasar Gedangan, Pasar Taman, Pasar Wadungasri, Pasar Prambon, dan Pasar Bulang. Seluruh ke-

giatan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Kepala Bidang Pasar Disperindag Sidoarjo, Sultan Hasan, menjelaskan bahwa rehabilitasi dilakukan dalam bentuk perbaikan dan pemeliharaan, bukan renovasi total.

"Tidak ada yang direhab to-

tal, hanya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pasar," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Kamis (17/7).

Fasilitas yang akan diperbaiki mencakup atap, saluran drainase, kios, dan sarana umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan baik bagi pengunjung maupun pedagang. Pelaksanaan pekerjaan

### LIMA PASAR YANG DIPERBAIKI

- Pasar Gedangan
- Pasar Taman
- Pasar Wadungasri
- Pasar Prambon
- Pasar Bulang

ditargetkan dimulai pada Agustus hingga September 2025. "Pekerjaan kami jadwalkan pada triwulan ketiga," tambahnya.

● Ke Halaman 10



### Lima Pasar Tradisional...

Proses lelang proyek dilakukan melalui sistem tender pascakualifikasi satu file dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Setiap paket pekerjaan ditujukan bagi pelaku

usaha berkualifikasi kecil.

Nilai pagu anggaran bervariasi, mulai dari Rp 499 juta hingga Rp 699 juta. Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sidoarjo, proyek dengan nilai tertinggi adalah reha-

bitasi Pasar Prambon, yakni sebesar Rp 699.950.790.

Saat ini, seluruh paket proyek masih dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Masing-masing tender diikuti oleh 38 hingga 48 peserta. (sai/vga)

## Polkesbaya Jurusan TEM Paparkan Sistem Telemedicine untuk Deteksi Dini Stunting

Sidoarjo, Bhirawa

Tim Pengabdian Masyarakat (Pengabmas) dari Poltekkes Kemenkes Surabaya Jurusan Teknologi Elektro Medis (TEM) menggelar workshop dengan tema 'Penerapan Sistem Telemedicine untuk Pengembangan Platform Telediagnosis Interaktif dalam Deteksi Dini Stunting'

digelar di Gedung Serba Guna Balai Desa Wonoayu, Sidoarjo.

Kegiatan ini merupakan bagian dari skema PPDM (Pengembangan dan Penerapan Desa Mitra) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi kesehatan.

Tim Pengabmas Poltekkes Kemenkes Surabaya di Desa Wono-

ayu Kabupaten Sidoarjo diketuai Dr Endro Yulianto ST MT, dengan anggota Syaifudin ST MT, Anita Miftahul Maghfiroh SST MT dibantu mahasiswa Berliana Fadhilah Faiz, Mohammad Yanuar Ichsa dan Miftakhul Huda Wildany.

Workshop ini dihadiri para ibu yang tergabung dalam Kelas Ibu Balita Desa Wonoayu, para tenaga kesehatan, dan stakeholder terkait, dengan menghadirkan narasumber Dyah Puspita Sari SKM RD Kepala Inst Gizi RS Dr Soetomo Surabaya, yang memaparkan tentang Gizi Seimbang untuk Mengatasi Stunting. Serta pentingnya deteksi dini stunting dan bagaimana sistem telemedicine dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah pedesaan.

Menurut Ketua Tim Pengabmas Poltekkes Kemenkes Surabaya, Endro Yulianto, Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata,

dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi, dan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat.

Dokter Endro menjelaskan, dalam implementasinya Pengabmas berupa pelatihan dan penyuluhan, pengabdian kesehatan, pengembangan masyarakat, penelitian terapan dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Dengan penerapan sistem telemedicine, kita dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini stunting dan memberikan intervensi yang tepat waktu kepada anak-anak yang berisiko," ujar Dr Endro Yulianto. [fen.wwn]



Pengabdian Masyarakat (Pengabmas) dari Poltekkes Kemenkes Surabaya Jurusan Teknologi Elektro Medis, Ketua Tim Dr Endro Yulianto ST MT, saat memberikan penjelasan kepada peserta workshop yang terdiri para ibu Balita dan Kader Posyandu.

HARIAN  
**Bhirawa**  
Media Digital Bhiru Weekend